

## SINOPSIS

Skripsi ini mengambil judul "Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di wilayah Yogyakarta". Mengingat kota Yogyakarta adalah salah satu kota tujuan wisata bagi wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan manca negara, maka keindahan dan kenyamanan kota sangat diutamakan. Keberadaan pedagang kaki lima terkadang menimbulkan masalah yang cukup serius yang dialami oleh pemerintah terutama oleh pemerintah kota Yogyakarta. Keberadaan mereka yang terkesan semprawut dan tidak teratur kemudian membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang penataan pedagang kaki lima yang tujuannya agar keberadaan pedagang kaki lima bisa lebih teratur dan tidak mengganggu kenyamanan, keindahan dan kebersihan lingkungan.

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode diskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan interview.

Analisis terhadap penelitian pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima di wilayah Yogyakarta jika dilihat secara umum berjalan dengan lancar. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pun sudah mulai dapat dirasakan, keberadaan pedagang kaki lima terlihat lebih tertata dan teratur. Terdapat pembagian ruang yang baik antar pengguna fasilitas yang ada. Walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah yang diantaranya adalah, perijinan yang belum maksimal, sumberdaya manusia yang masih rendah, sarana dan prasarana yang belum memadai, selain itu juga masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang diakibatkan kurangnya kesadaran dari pedagang kaki lima seperti, tidak mengemas alat atau barang dagangannya, melakukan kegiatan usaha selama 24 jam serta melakukan kegiatan-kegiatan di daerah larangan. Tetapi dalam pelaksanaannya pemerintah juga mendapat dukungan seperti adanya Peraturan daerah yang mengatur PKL, adanya dana untuk melakukan penataan, serta adanya tim yang melakukan penataan dan penertiban terhadap PKL.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan penataan pedagang kaki lima dapat berjalan dengan baik dan akan lebih maksimal lagi jika semua pihak yang terkait baik dari Pemerintah Kota, masyarakat, ataupun pedagang kaki lima itu sendiri saling bahu membahu serta ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program tersebut. Dan yang lebih diutamakan adalah masyarakat dan terutama bagi pedagang kaki lima sadar dan paham tentang arti pentingnya suatu kebersihan, keindahan dan kenyamanan